

**OPTIMALISASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN
DI DESA BONTO SALAMA KECAMATAN
SINJAI BARAT**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MUH. ANWAR
90300115130

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

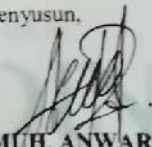
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Anwar
NIM : 90300115130
Tempat / Tgl. Lahir : Sinjai 27 Juli 1997
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Dusun Tapillasa, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai
Tengah, Kabupaten Sinjai.
Judul : Optimalisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Alokasi
Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bonto
Salama Kecamatan Sinjai Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar dan hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, November 2019

Penyusun,


MUH. ANWAR
NIM: 90300115130



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong – Gowa . ■ 424835, Fax424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *“Optimalisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat”*, yang disusun oleh **MUH. ANWAR**, NIM **90300115130**, Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 04 November 2019 bertepatan dengan 07 Rabi’ul-Akhir 1441, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Samata-Gowa, 04 November 2019
07 Rabi’ul-Akhir 1441

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hj. Rika Dwi Ayu Parmitasari, SE., M.Comm.	(.....)
Penguji I	: Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag	(.....)
Penguji II	: Dr. Hasbiullah, SE., M. Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Siradjuddin, SE., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Sitti Aisyah, S.Ag., M.Ag.	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, atas limpahan Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***Optimalisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat,***”. Sebagai syarat menyelesaikan studi strata satu (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi penyajian materi. Karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun penulis diharapkan demi penyempurnaan laporan berikutnya. Dalam masa penulisan ini penulis banyak terdapat bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak.

Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, ayahanda Baharuddin dan ibunda Lina yang telah memberikan semangat, dan dukungannya serta doa yang tak ada hentinya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., PhD selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. H. Abustani Ilyas M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Siradjuddin., SE., M.Si selaku Ketua jurusan Ilmu Ekonomi.

4. Bapak Dr. Hasbiullah., SE., M.Si selaku Sekertaris urusan Ilmu Ekonomi.
5. Bapak Dr. Siradjuddin., SE., M.Si selaku pembimbing utama atas kesediaannya memberikan bimbingan, mengoreksi dan masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Sitti Aisyah, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II atas kesedian-nya untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi dengan arahan, koreksi dan masukannya yang membangun dalam proses penyusunan skripsi sampai taraf penyelesaian.
7. Segenap dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Badan Kesatuan Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Kepada Kepala Desa Bonto Salama yang telah memberi izin agar penulis dapat melakukan penelitian ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua staff kepala desa dan masyarakat . Terima kasih banyak untuk menyediakan waktunya agar penulis dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan.
10. Kepada keluarga saya terutama buat kedua orang tua, saudara kandung, sepupu dan keluarga besar saya , terima kasih atas doa dan dukungannya.
11. Kepada Nurlaela yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta masukan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Kepada semua sahabat ekonomi intelegen terimah kasih atas semangat dan dukungannya serta doanya dalam menyelesaikan skripsi penulis.
13. Kepada teman-teman seperjuangan terkhusus Ilmu Ekonomi, Yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Semoga kita semua dapat meraih kesuksesan.

14. Kepada senior-senior dan junior-junior Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan semangat serta dukungan sehingga selesainya skripsi penulis.
15. Seluruh teman-teman KKN angkatan 60 di Kelurahan Balang Kecamatan Binamu, kabupaten Jeneponto dan terkhusus kepada saudara tak sedarah di posko KKN diantaranya: Saudari Nurlaela, Asmi, Lisa, Anti, Neny, Ayu (AW), Riri, dan saudara, Sumo, Yuda, dan Erik
- Akhirnya penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Terima Kasih. Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Samata, Juli 2019

Penulis,

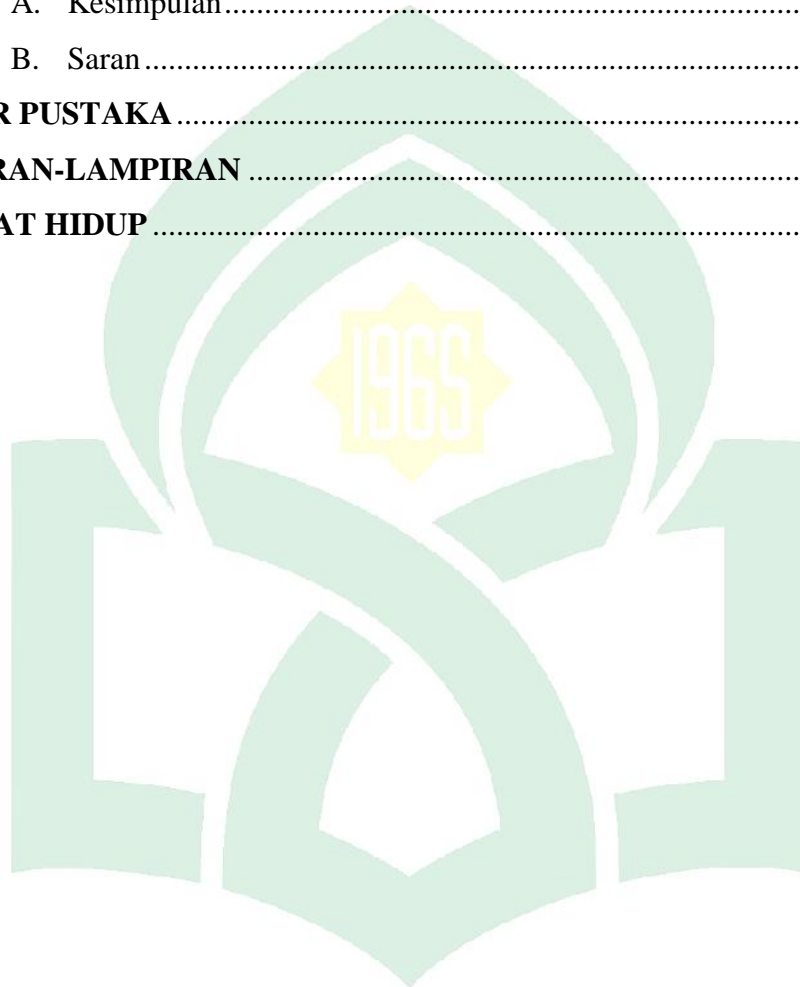
Muh.Anwar
9030115130

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-11
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Kajian Pustaka	8
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	13-37
A. Pengertian Dan Pembangunan Desa	13
B. Pengertian Optimalisasi	23
C. Alokasi Dana Desa.....	25
D. Kerangka Konseptual.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38-44
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	38
B. Jenis Dan Sumber Data.....	39
C. Metode Pengumpulan Data.....	40
D. Definisi Operasional Variabel	41
E. Metode Analisis Data.....	42
F. Keabsahan Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45-71
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian Desa Bontosalama Kecamatan Sinjai Barat	45

B. Hasil Penelitian.....	55
C. Pembahasan	68
BAB V KESIMPULAN	72-73
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74-75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



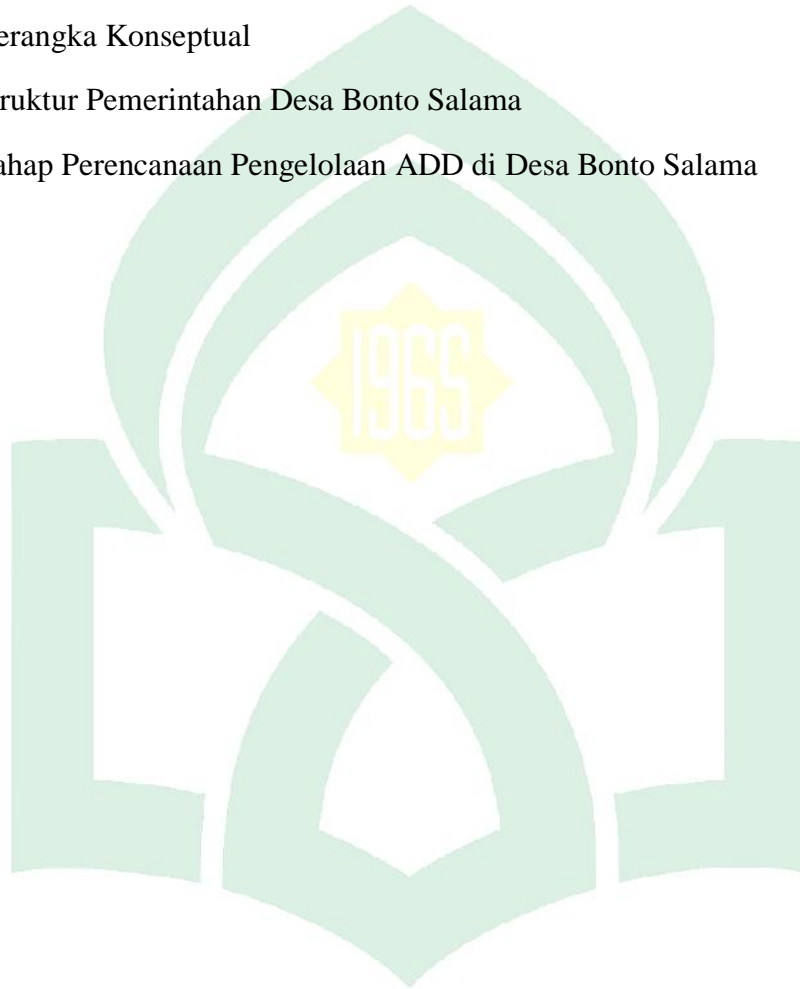
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

No.	Teks	halaman
1.1	Penelitian Terdahulu	8
4.1	Demografi Desa Bonto Salama	45
4.2	Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia	46
4.3	Akseptor Keluarga Berencana	46
4.4	Kader Pembangunan Desa	46
4.5	Tingkat Pendidikan Penduduk	47
4.6	Penduduk Menurut Mata Pencaharian	48
4.7	Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis secara Umum	49
4.8	Jumlah Tenaga medis dan Paramedis Perwilayah	49
4.9	Jumlah PMKS	50
4.10	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	51
4.11	Alokasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 2018	64

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	halaman
2.1	Kerangka Konseptual	37
4.1	Struktur Pemerintahan Desa Bonto Salama	54
4.2	Tahap Perencanaan Pengelolaan ADD di Desa Bonto Salama	57



ABSTRAK

N a m a : Muh. Anwar
N I M : 903001151230
Judul : Optimalisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat”

Penelitian ini membahas mengenai Optimalisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat. Alokasi Dana Desa menjadi peran penting bagi pembangunan dan kemajuan suatu desa untuk menunjang keberhasilan mengenai optimalisasi alokasi dana desa sesuai Peraturan Bupati No.2 Tahun 2018. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui Optimalisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat.

Metode penelitian yang di gunakan adalah observasi,wawancara,dan dokumen. Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan metode pendekatan fenomenologi. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan subjek penelitian yang terdiri dari Pemerintah Desa,BPD dan Masyarakat Desa Bontosalama Kecamatan Sinjai Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Optimalisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat, dimana dilihat dari perencanaan dan pelaksaan terjadi beberapa hambatan hambatan yang terjadi pada tahap perencanaan adalah proses penyusunan perencanaan di mana pada proses ini terlebih dahulu di adakan musrembang desa yang selanjutnya baru di adakan perencanaan. Musrembang diadakan di tiap dusun untuk kemudian menentukan/menyusun perencanaan.akan tetapi,dalam tahap musrembang terjadi permasalahan yaitu kurangnya tingkat partisipasi warga untuk ikut dalam kegiatan musrembang yang di laksanakan sehingga hal ini menghambat pemerintah untuk memutuskan pembangunan apaa yg di butuhkan oleh masyarakat tersebut. Untuk sisi pelaksanaan dimana dari hasil penelitian terjadi beberapa masalah. pertama, Tim Pelaksana Kegiatan yang terpilih tidak mengerjakan pekerjaan yang di berikan secara tepat waktu dikarenakan TPK yang terpilih mempunyai pekerjaan lebih dari satu sehingga ia harus mengorbankan salah satu pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang lainnya. Kedua masalah cuaca dan akses yang buruk, masalah ini menghambat pelaksanaan pembangunan dekker yang di kerjakan karena pada saat pengerjaanya bertepatan musim penghujan dan di tambah akses yang buruk untuk menjangkau lokasi pengerjaaan dekker tersebut. Akibatnya, proses pengerjaannya melewati batas yang di tentukan sehingga dalam proses pelaksanaanya tidak optimal sesuai petunjuk Peraturan Bupati No 2 tahun 2018.

Kata Kunci :Perencanaan, Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang menyebutkan desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan dan alokasi keuangan desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Selain itu, daerah provinsi juga memiliki status sebagai otonomi daerah. Di Indonesia otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peundang-undangan. Pemerintah daerah harus melakukan upaya dalam mengoptimalkan anggaran dana desa serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik.

Indonesia merupakan negara yang berkembang. Istilah desa sering kali diidentikkan dengan masyarakat yang miskin, dan tradisional. Sebenarnya desa memiliki keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa merupakan pelopor demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama desa memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan Undang-Undang yang telah dinantikan oleh segenap masyarakat Desa tak terkecuali perangkat desa. Tepatnya Rabu, 18 desember 2013, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang desa disahkan menjadi UU desa. Kemudian pada 15 Januari 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) resmi mengesahkan UU tersebut. Undang-Undang ini merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diikuti dengan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Sementara itu dalam peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, memberikan arah penyempurnaan atas peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.¹

Desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang mengatur rumah tangga sendiri. Desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi *independen community*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari tingkatan atasannya. Desa yang selama ini menjadi figuran dan objek, sekarang berperan sebagai aktor.² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai di mulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan pembangunan

¹Desmon Mahamurah, dkk. *Optimilisasi Alokasi Dana Desa Dalam meningkatkan Pembangunan Desa studi di desa Nahepese kecamatan manganitu*. jurnal (2017), h. 3-4.

²Desmon Mahamurah, dkk. *Optimilisasi Alokasi Dana Desa Dalam meningkatkan Pembangunan Desa studi di desa Nahepese kecamatan manganitu*. jurnal (2017), h. 5.

desa sesuai pasal 78 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.³

Memberikan hak-hak pada setiap desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya. Dengan adanya UU ini, maka setiap desa dapat mensejahterkan masyarakatnya sesuai dengan prakarsa pada masing-masing desa yang merupakan salah satu amanat dari UU tersebut dikatakan setiap desa akan mendapatkan alokasi dana desa dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Paling sedikit 10% setiap tahunnya. Maka dapat diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1,2 miliar hingga 1,4 miliar setiap tahunnya. Berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU desa yaitu, 10% dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 45,4 triliun total dana desa untuk desa adalah Rp.104,6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se Indonesia dana tersebut akan dialirkan ke seluruh desa yang ada di Indonesia melalui Kabupaten, tanpa dipotong sepeser pun. Sementara pola penyaluran dana desa menggunakan pola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan yang dibuat oleh kementrian pekerjaan umum, yakni Program Pembangunan Ifrastruktur Pedesaan (PPIP) dua pola ini bisa berarti jalan, irigasi, waduk dan sebagainya.

Namun disamping dampak baik dari adanya dana desa ini pemerintah atau pelaksana dari anggaran desa terkhusus bagi Desa Bontosalama tersebut belum

³Herry, *Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa Tujuan Desentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa*. Jurnal ilmiah civis. Vol. V, No. 1 (Januari,2015), h. 3.

mampu dilaksanakan dengan baik hal ini nampak dari kegiatan yang dilakukan. Beberapa dari pembangunan fisik yang dilakukan juga tidak sesuai dengan perencanaan yang di tetapkan hal ini juga tidak sesuai dengan Peraturan Bupati No 2 tahun 2018 tentang prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang di tetapkan oleh bupati yang terdapat pada pasal 4 (empat) tentang prinsip dan etika Pengelolaan Alokasi Dana Desa poin (a). efisien, yaitu pengadaan barang dan jasa harus di usahakan dengan menggunakan dana yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang di tetapkan atau menggunakan dana yang telah di tetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum (b). partisipatif, yaitu setiap kegiatan yang dilaksanakan akan melibatkan masyarakat dimulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. (c). Transparan, yaitu setiap program yang dilaksanakan dapat di pertanggung jawabkan serta di laporkan sesuai terhadap yang dilaksanakan. dalam hal ini pelaksanaan alokasi dana desa belum optimal sesuai aturan Peraturan Bupati No 2 tahun 2018.

Adapun pemberdayaan manusia serta pembangunan ekonomi belum mampu secara optimal dilaksanakan oleh pelaksana dari anggaran dana desa ini sehingga pemanfaatan dana desa tidak terlaksana secara optimal, untuk pembangunan manusia belum terlaksana secara optimal hal ini dilihat dari pemanfaatan rumah belajar yang menjadi sarana belajar para pemuda/pemudi di Desa Bontosalama kurang meminati sarana yang telah di sediakan oleh pemerintah setempat padahal, tujuan didirikannya rumah belajar tersebut ialah merangkul para pemuda/pemudi yang di dalamnya di ajarkan untuk lebih aktif belajar dan

berwirausaha di Desa Bontosalama. Untuk Pengelolaan sumber daya yang ada di desa belum terealisasi dengan baik meskipun pengarahan dan bimbingan yang telah di ajarkan oleh para pendamping desa telah di arahkan namun partisipasi warga sangat minim. Padahal jika me-rujuk pada tujuan dari penggunaan alokasi dana desa 70% penggunaanya diguna-kan untuk pembangunan manusia atau pun sumber potensial ekonomi lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bupati Sinjai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dana Transfer Desa, dana transfer adalah dana yang bersumber dari Dana Desa, Dana Bagi Hasil, Pajak dan Retribusi Daerah, ADD, dan Bantuan Keuangan yang ditransfer ke rekening Pemerintah Desa.” Selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Sinjai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dana Transfer Desa, dikemukakan bahwa “tujuan pembagian dana transfer untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sehingga melalui ADD desa berpeluang meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Untuk Mewujudkan tujuan peraturan perundangan tersebut, dana transfer haruslah dikelola dengan tahapan yang sesuai Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Menindaklanjuti peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sinjai telah merealisasikan kebijakan pemberian ADD kepada setiap desa. Pemerintah Kabupaten Sinjai mengeluarkan Peraturan

Bupati Sinjai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Dana Transfer pada setiap desa di Kabupaten Sinjai. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai yang telah mendapatkan realisasi dari kebijakan tersebut adalah Kecamatan Sinjai Barat salah satunya Desa Bontosalama.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui beberapa fakta pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sinjai Desa Bontosalama, yaitu: 1) Pada tahap perencanaan, Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa dengan melakukan musyawarah yang melibatkan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat, namun keterlibatan masyarakat sangat minim serta penyusunan yang terlambat sehingga tidak disepakati pada tahun berjalan. 2) Pada tahap pelaksanaan, juga belum optimal dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 2 Tahun 2018

Beberapa hasil penelitian mengenai pengelolaan ADD di beberapa daerah menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian oleh Thomas yang berjudul pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan Di desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan ADD dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan ADD di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung menunjukkan bahwa 30 persen dari dana ADD bisa berjalan sesuai dengan petunjuk namun 70 persen dari ADD berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik dan pengadaan barang. Hambatan yang dihadapi dalam proses pengelolaan ADD adalah

rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi.⁴ Penelitian Selanjutnya oleh M. Ridwan dan M. Yusuf yang berjudul analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di kecamatan Mare Kabupaten Bone yang bertujuan bertujuan untuk mengetahui pengelolaan ADD di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan 63 indikator di Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas maka judul penelitian ini yaitu:
Optimalisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Di Desa Bontosalama Kecamatan Sinjai Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan di Desa Bontosalama kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai yang telah dilaksanakan selama ini?
2. Apakah ada Faktor yang menghambat pengelolaan Anggaran Dana Desa sehingga tidak optimal?

⁴Thomas, *pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. ejournal pemerintahan integratif, vol.1 No. 1 (Maret 2013), h.51.

⁵ M. Ridwan dan M. Yusuf, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Vol. 1 No. 1 (Januari, 2018), h. 87.

C. Kajian Pustaka

Berdasarkan studi kepespustakaan yang dilakukan, ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4
	Thomas (2013)	pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan yang dilaksanakan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dan dirangkai dari tahap-tahapan pelaksanaan kegiatan didalam mengalokasikan semua dana desa yang mana dana tersebut berasal dari anggaran alokasi dana desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam wilayah kabupaten Tana Tidung telah ditetapkan bahwa tujuan dana ADD tersebut untuk 30% pelaksanaannya pada kegiatan belanja aparatur dan operasional dan 70% pelaksanaannya untuk kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di desa Sebawang untuk 30% dari dana ADD bisa berjalan

			sesuai dengan petunjuknya kemudian untuk yang 70% dari ADD berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pada tahun 2010 dan 2011 sedangkan untuk tahun 2012 lebih kepada pengadaan barang. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan ADD menjadi hambatan dalam prose pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebangang.
1	2	3	4
2.	Novianti Ruru1, dkk (2017)	<p>Analisis penerapan alokasi dana desa (add) dalam upaya</p> <p>Meningkatkan pembangunan desa (studi kasus pada desa suwaan,</p> <p>Kecamatan kalawat, kabupaten minahasa utara)</p>	<p>Hasil penelitian diperoleh dengan dilaksanakannya penelitian tentang penerapan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa (studi kasus pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara) bahwa secara keseluruhan penerapan alokasi dana desa pada Desa Suwaan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa Se- Kabupaten Minahasa Utara. Selain berdasarkan Peraturan Bupati</p> <p>Minahasa Utara, Penerapan Alokasi Dana Desa juga sudah sesuai dengan tujuan</p>

			<p>pada umumnya yaitu untuk meningkatkan pembangunan baik fisik maupun nonfisik. Selain itu Penerapan Alokasi Dana Desa di Desa Suwaan juga sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini terlihat dari adanya keterbukaan kepada masyarakat mengenai laporan dan pelaksanaan ADD, juga dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.</p>
1	2	3	4
3	Silas Roberto, dkk	Analisis pengelolaan alokasi dana desa (ADD) Di desa wuasa kecamatan lore utara	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa, seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui</p>

			<p>Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.</p>
--	--	--	---

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan pembangunan di Desa Bontosalama kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai yang telah dilaksanakan selama ini
2. Mengetahui faktor yang menjadi penghambat Alokasi Dana Desa sehingga tidak optimal.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat

mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang ingin melakukan penelitian mengenai pengelolaan anggaran dana desa.

2. Secara praktis sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah pengelolaan anggaran dana desa. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengambil solusi yang tepat dan baik guna memecahkan masalah tentang pengelolaan anggaran dana desa.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Pengertian Dan Pembangunan Desa*

1. Definisi Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang di wujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedudukan desa dalam sistem pemerintahan berkedudukan di wilayah kabupaten/kota terdiri dari desa dan adat.⁶

Pengertian desa berasal desa berasal dari Bahasa India Swadesi yang berarti tempat atau asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.⁷ Istilah desa dan pedesaan sering di kaitkan perkotaan (*urban*). Konsep pedesaan dan perkotaan mengacu pada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu satuan wilayah administrasi atau satuan wilayah teritorial, dalam hal ini pedesaan mencakup beberapa desa. Desa dibentuk

⁶Sri Mulyani, *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta:Kementrian Keuangan, 2017), h. 11.

⁷ yulianti, yuyuk dan mangku *Sosiologi Pendesaan*. (Jakarta:Lapera,2003) h. 32.

berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah satu dengan daerah lain berbeda budayanya. Beberapa para ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauan masing-masing. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Menurut Wahjudin sejarah perkembangan desa di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari Republik Indonesia sendiri. Sebelum masa kolonial berbagi daerah telah dikenal berbagai kelompok masyarakat yang bermukim disuatu wilayah atau daerah tertentu dengan ikatan kekerabatan atau keturunan. Pola permukiman berdasarkan keturunan atau ikatan emosional kekerabatan berkembang terus baik dalam ukuran maupun jumlah yang membentuk gugus atau kesatuan permukiman.

Desa adalah hasil perpaduan antara kegiatan kelompok manusia dan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan suatu perwujudan atau ketampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah dan sosial, seperti geografis, sosial ekonomi, politik, dan budaya antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Bintaro mengemukakan bahwa ada tiga unsur utama desa, yaitu:

- 1) Daerah, dalam arti kawasan perdesaan tentunya memiliki wilayah sendiri dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, kondisi tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya.
- 2) Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran dan kepadatan

penduduk, rasio jenis kelamin komposisi penduduk serta kualitas penduduknya.

- 3) Tata kehidupan, berkaitan erat dengan, norma, dan karakteristik budaya lainnya.

2. Pembangunan Desa

a. Teori Pembangunan Desa

Rostow (1971) menyatakan, bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak output daripada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan : masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih sektor. Pesatnya pertumbuhan sektor utama ini telah menarik bersamanya bagian ekonomi yang kurang dinamis.⁸

Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri.

Menurut Todaro pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan

⁸Lembaga Administrasi Negara, *Teori dan Indikator Pembangunan*. (Jakarta:LAN, 2008) h.32

pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang.

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Adapun definisi pembangunan desa menurut para ahli adalah sebagai berikut: Menurut Kartasmita mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.⁹

Pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekadar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan

⁹Astrella Janice, *Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bpmd) dalam pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*, ejournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 3 h. 11

kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan pedesaan.¹⁰

Menurut Haeruman ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu:

- a) Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat Desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.
- b) Sisi yang lain, memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.
- c) Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung didesa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 tahun 2005 Tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Perencanaan pembangunan sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan.
- b) Menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

¹⁰Priyo Sambodo, *Implementasi Dana Bantuan PT. Kideco Jaya Agung dalam Pembangunan di Desa Sempulang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser*, ejournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No.2 (2014), h. 1

- c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Desa secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.¹¹

Pembangunan pedesaan telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan kompleksitas permasalahan yang terjadi di daerah pedesaan. Berikut beberapa strategi pembangunan pedesaan.

- a) Pembanguna pertanian
- b) Industrialisasi pedesaan
- c) Pembangunan masyarakat
- d) Strategi pusat pertumbuhan¹²

b. Perencanaan Pembangunan

Terdapat beberapa pengertian mengenai konsep perencanaan pembangunan. Albert Waterston menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan adalah melihat ke depan dengan mengambil pilihan sebagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan. Menurut Riyadi perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan

¹¹Endang Soetari, *Kebijakan Publik*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h.14.

¹²Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pedesaan*. (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016), h. 216-217.

sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik dalam rangka pencapaian tujuan.¹³

Mengacu definisi dari berbagai ahli oleh Suhadak dan Trilaksono perencanaan diartikan sebagai kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan dimasa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang akan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Berdasarkan uraian di atas, sesungguhnya perencanaan memerlukan waktu yang relatif lama karena di sana terdapat beberapa usaha untuk mengumpulkan data dan informasi agar sesuatu yang direncanakan tersebut sesuai dengan sasaran dan harapan. Selain itu perencanaan membutuhkan pemikiran-pemikiran yang mendalam agar segala sesuatu yang dilaksanakan dalam implementasinya dapat meminimalkan timbulnya unintended effect.

Selain sebagai pemilihan alternatif dan penentuan alokasi sumber daya, perencanaan setidaknya mempunyai dua makna penting : 1) menyusun langkah-langkah untuk memastikan tujuan (hal yang hendak dicapai), dan 2) membuat suatu prediksi mengenai hal-hal yang patut diduga bisa menghambat proses, dan hal ini berarti bahwa perencanaan merupakan bagian dari suatu tindakan untuk mengantisipasi masa depan. Perencanaan sebenarnya merupakan arena partisipasi, yang sesungguhnya memegang peran penting dalam memperlihatkan apa yang akan dilakukan di masa depan terhadap sumber daya yang terbatas. Perencanaan

¹³ Riyadi dan Dedi supriad, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 7

hadir untuk memberi wahana mempertemukan kepentingan rakyat dengan kebijakan yang dirumuskan pemerintah. Oleh karena itu, perencanaan harus dikelola secara demokratis, yaitu berangkat dari partisipasi masyarakat. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung).¹⁴

Mengacu pengertian perencanaan pembangunan diatas, maka perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan desa dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan desa terdiri atas:

- 1) Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa)

RPJMDesa adalah suatu dokumen perencanaan jangka panjang yang periodenya lima tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, perangkat desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

- 2) Rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa)

RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk priode satu tahun, merupakan penjabaran RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang di mutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta

¹⁴ Abdur Rozaki dkk, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. (Yogyakarta: IRE PRESS, 2005) h. 75

Dalam melakukan suatu pekerjaan, niat dan perencanaan sangat penting. Segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Dalam Al-Qur'an dijelaskan Surah QS. Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman:

[illegible]

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁶

Maksud dari ayat diatas yaitu perencanaan yang diawali dengan niat yang baik akan mencapai tujuan yang baik pula. Niat adalah tolak ukur suatu amalan; diterima atau tidaknya tergantung niat dan banyaknya pahala yang didapat atau sedikit pun tergantung niat. Niat adalah perkara hati yang urusannya sangat penting, seseorang bisa naik ke derajat shiddiqin dan bisa jatuh ke derajat yang

¹⁶ Departemen Agama RI. 2010.

paling bawah disebabkan karena niatnya. Perencanaan secara konvensional adalah suatu kegiatan yang dilakukan demi meraih masa depan yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya. Perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi.

c. Indikator Pembangunan Desa

Adapun indikator dalam pembangunan desa:

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa harus melalui musrenbang desa haruslah berdasarkan kondisi lingkungan dan potensi wilayah. Perencanaan pembangunan desa adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengelokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu.

2. Pelaksanaan pembangunan

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur merupakan bentuk wujud terlaksananya sebuah perencanaan yang terencana secara sistematis dan konseptual.

3. Pengawasan pembangunan

Pengawasan adalah proses hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan kebijakan yang telah ditentukan agar semua perencanaan dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi pembangunan

1. Dana. Dana merupakan salah satu sumber utama dalam melakukan pembangunan sebab peranan dana sangat kompleks diantaranya sebagai penyedia sumber sumber yang dibutuhkan.
2. Perencanaan. Perencanaan yang sistematis dan terarah merupakan salah satu faktor penentu sebuah pembangunan, arah yang jelas
3. Pengelolaan. Dengan pengelolaan dana yang baik pembangunan akan dapat terlaksana sesuai perencanaan yang telah di tentukan sebab, Pengelolaan penentu output atas apa yang akan di lakasanakan.
4. Pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan apakah realisasinya sesuai dengan tahap perencanaan.
5. Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mempercepat realisasi dari pembangunan, sebab tanpa adanya partisipasi masyarakat maka pembangunan kurang maksimal Pengelolaan.

B. *Pengertian Optimalisasi*

Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti yang terbaik. Jadi optimalisasi adalah proses pencapaian dengan hasil dan keuntungan besar tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas dari pekerjaan. Pengertian optimalisasi

menurut KBBI optimalisasi berasal dari kata optimal berarti terbaik, tertinggi jadi optimalisasi adalah proses meninggikan atau meningkatkan.

Dilihat dari sudut pandang usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keinginan yang di kehendaki. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kegiatan yang di penuhi dari kegiatan-kegiatan yang di laksanakan dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat di wujudkan apabila dalam perwujudanya secara efektif dan efisien.¹⁷

Optimalisasi sebagai pendekatan normatif, dapat mengidentifikasi penyelesaian terbaik dari suatu permasalahan yang diarahkan pada titik maksimum atau minimum suatu fungsi tujuan. Setiap perusahaan akan berusaha mencapai keadaan optimal dengan memaksimalkan keuntungan atau meminimumkan biaya produksi. Pada sektor ekonomi contoh persoalan optimalisasi maksimasi adalah memaksimalkan laba perusahaan dan memaksimalkan laba perusahaan serta memaksimalkan hasil penjualan. Untuk minimisasi adalah minimisasi biaya produksi dan minimisasi biaya transportasi.¹⁸

Penentuan Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa bergantung pada kualitas penyusunan perencanaan yang di buat serta, implementasi dari perencanaan yang menjadi output penilaian optimalnya suatu kegiatan yang di laksanakan.

¹⁷Winardi, *Pengantar manajemen penjualan*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1999) h. 393

¹⁸Natalia Esther Dwi Astuti, Lilik Linawati, dan Tandjung Mahatma, *Penerapan model linear good programming untuk optimisasi perencanaan produksi*, 2013.h.464

Hal ini harus sesuai dengan Peraturan Bupati No 2 tahun 2018 tentang prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa yang didalamnya memuat asas partisipasi yang harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan adalah partisipasi warga yang harus ikut terlibat berpartisipasi aktif sesuai yang di sebutkan pada peraturan bupati No.2 tahun 2018.¹⁹

C. Alokasi Dana Desa

1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang desa tahun 2005, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), yang pem-bagiannya untuk desa secara proporsional.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Alokasi dana desa menurut (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah di kurangi dana alokasi khusus.

¹⁹ Bupati Sinjai 2018. Peraturan Bupati No.2 Tentang prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa, pasal IV ayat (1).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka secara umum pengertian alokasi dana desa ialah kelompok transfer Alokasi Dana Desa atau (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah meng-alokasikan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota ADD setiap tahun anggaran. ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus ADD mempertimbangkan:

a) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan b) Jumlah desa angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

2. Dasar Hukum Tentang Alokasi Dana Desa

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan.

Selanjutnya, agar fungsi pemerintahan daerah terlaksana secara optimal, perlu diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, disamping kemampuan daerah sendiri dalam menggali sumber pendapatan

daerah yang dapat dijadikan kekuatan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.²⁰

Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat menjadi urusan pemerintah daerah. Demikian pula masih dikenal adanya tugas dekonsentrasi maupun tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yaitu: Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana yang di maksud pada ayat (3) pemerintah dapat: a) Menyelenggarakan sendiri sebagai urusan pemerintahan; b) Melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah; dan c) Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.²¹

Alokasi dana desa dimaksudkan untuk memberikan stimulant pembiayaan pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari pemberian alokasi desa ini adalah: a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan d) Mendorong peningkatan swadaya dan gotong

²⁰Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Edisi Ke-1, h. 176.

²¹Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 10 ayat (3).

royong masyarakat di desa. Pengalokasian ADD dan tata cara pengalokasian ADD di-tetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.

Peraturan Bupati No. 2 tahun 2018 tentang prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang di tetapkan oleh bupati yang terdapat pada pasal 4 (empat) tentang prinsip dan etika Pengelolaan Alokasi Dana Desa poin (a). efisien, yaitu pengadaan barang dan jasa harus di usahakan dengan menggunakan dana yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang di tetapkan atau menggunakan dana yang telah di tetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum (b). partisipatif, yaitu setiap kegiatan yang dilaksanakan akan melibatkan masyarakat dimulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. (c). Transparan, yaitu setiap program yang dilaksanakan dapat di pertanggung jawabkan serta di laporkan sesuai terhadap yang dilaksanakan.²²

3. Maksud, Tujuan dan Sasaran Alokasi Dana Desa

Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di-sebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Selain itu, masyarakat desa memiliki beberapa hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya:

²² Bupati Sinjai 2018. Peraturan Bupati No. 2 Tentang prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa, pasal IV poin 1-3.

- a) Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b) Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c) Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d) Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa.²³

Mewujudkan apa yang menjadi kewajiban desa dan hak masyarakat desa tersebut maka sangat diperlukan tersedianya dana untuk itu. Salah satunya yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun maksud, tujuan dan sasaran dari ADD di Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

a) Maksud

Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintahan Kabupaten Sinjai kepada pemerintah desa yang berasal dari anggaran pendapatan Kabupaten Sinjai, di-maksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.²⁴ Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan didalam Peraturan Bupati Sinjai dengan Peraturan Bupati

²³Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 67 ayat (2) point (b),(d) dan (e), op.cit, h. 37-38.

²⁴Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) (Sinjai: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa, 2018).

No 2 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Sinjai pada Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2: ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat Desa.

b) Tujuan

Adapun tujuan dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- (2) Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- (4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- (5) Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/miskin.²⁵

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

Pasal 19:

²⁵Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) (Kabupaten Sinjai: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa, 2018).

- (1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- (2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- (4) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- (5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- (6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- (7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- (8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).²⁶

c) Sasaran

Sasaran utama Alokasi Dana Desa (ADD) adalah: (1) Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (2) Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa; (3) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat; dan (4) Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa²⁷

4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

²⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa, BAB IX Pasal 19

²⁷Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) (Kabupaten Sinjai: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa, 2018)

- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- e. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibentuk Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa, Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten. Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut:

1) Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa

Di Desa Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan sebagai berikut:

- a) Penanggung jawab : Kepala Desa atau pelaksana Tugas Kepala Desa dari Perangkat Desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);

- b) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) : Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
- c) Sekretaris Desa : Koordinator Pelaksanaan Keuangan Desa;
- d) Bendahara Desa : perangkat Desa yang ditunjuk melalui surat keputusan (SK) Kepala Desa (penanggung jawab Administrasi Keuangan);
- e) Ketua Perencana dan Pelaksana Partisipatif Pembangunan : Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
- f) Pelaksana kegiatan dan pemberdayaan perempuan : Tim Penggerak PKK Desa.

Tugas penanggung jawab selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) dan Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Tim Penggerak PKK dan Lembaga lainnya, untuk membahas masukan dan usulan-usulan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rencana Kegiatan Desa (RKD) yang dibiaya dari Alokasi Dana Desa (ADD);
- b) Mensosialisasikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) melalui rapat/pertemuan untuk mendapat tanggapan masyarakat tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa);

- c) Mempertanggung jawabkan semua kegiatan baik yang dibiaya dari Pendapatan Asli Desa (PAD) dan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD);
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa;
- e) Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan di Desa;
- f) Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggung jawaban keuangan Desa serta laporan swadaya masyarakat secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Kabupaten;
- g) Menetapkan Kebijakan tentang Pelaksana APBDesa;
- h) Menetapkan Kebijakan tentang Pengelolaan Barang Desa;
- i) Menetapkan Bendahara Desa;
- j) Menetapkan Petugas yang melakukan Pemungutan Penerimaan Desa.
- k) Menetapkan Petugas yang melakukan Pengelolaan Barang Milik Desa.

Tugas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan kegiatan pada penanggung jawab kegiatan;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
- c) Menyampaikan laporan kegiatan baik fisik dan keuangan kepada penanggung jawab kegiatan.

Tugas Sekretaris sebagai berikut :

- a) Menyusun dan melaksanakan pengelolaan APBDesa;
- b) Menyusun dan melaksanakan pengelolaan barang desa;
- c) Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBDesa;
- d) Menghimpun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa;
- e) Membantu penanggung jawab dalam menyusun rencana kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang dituangkan pada Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang dijabarkan dalam APBDesa;
- f) Membantu mengkoordinasikan tugas penanggung jawab;
- g) Melaksanakan pelayanan teknis Administrasi kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
- h) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD).

Tugas Bendahara Desa sebagai berikut :

- a) Membuka rekening desa bersama Kepala Desa atas nama Pemerintahan Desa yang bersangkutan;
- b) Membuka nomor pokok wajib pajak atas nama Pemerintah Desa;
- c) Membukukan penerimaan dan pengeluaran uang disertai dengan bukti-bukti pendukung dan memelihara bukti-bukti;
- d) Menyimpan dan memelihara semua arsip, dan segala transaksi keuangan, buku keuangan sebagai bahan pemeriksaan pada buku Kas Umum; 5. Menyusun anggaran kegiatan;

- e) Menyetorkan pajak;
- f) Menyampaikan laporan keuangan kepada penanggung jawab;

Tugas Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai wadah perencanaan dan pelaksana partisipasi pembangunan yaitu:

- a) Bersama kepala desa selaku penanggung jawab kegiatan memfasilitasi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan fisik dan non fisik yang dibiayai baik oleh Alokasi Dana Desa (ADD) atau dari pihak ketiga;
- b) Memberdayakan bersama ketua T.P.PKK dalam membina Lembaga pemberdayaan Posyandu di Desa;
- c) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d) Menyusun tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- e) Merekapitulasi hasil-hasil kegiatan pelaksana teknis;
- f) Menggerakkan swadaya partisipasi masyarakat;
- g) Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan;
- h) Ketua Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada kepala desa.

Tugas Tim Penggerak PKK selaku Ketua Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai berikut:

- a) Bersama Kepala Desa selaku penanggung jawab kegiatan memfasilitasi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pemberdayaan perempuan;

- b) Bersama ketua LKMD membina perkembangan LPP posyandu;
- c) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d) Menyusun tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- e) Merekapitulasi hasil-hasil kegiatan pelaksana teknis;
- f) Menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat;
- g) Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa selaku penanggung jawab kegiatan.

5. Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

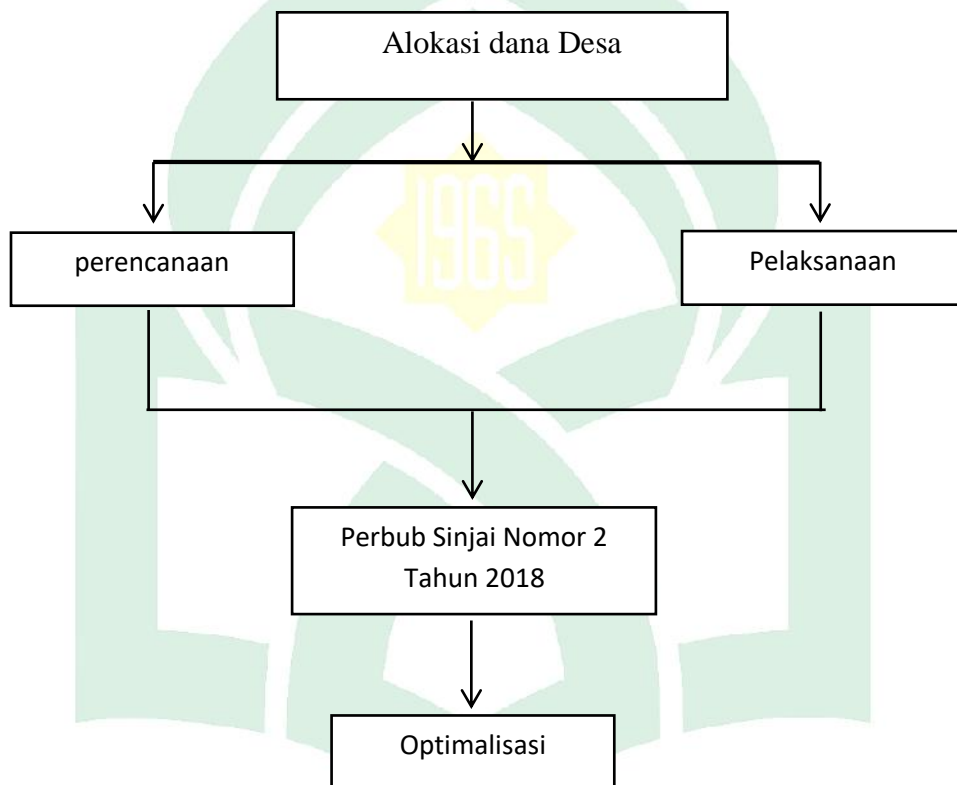
Arah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan oleh desa dan tidak dibagikan perdusun. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sinjai terbagi menjadi 2 bagian yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan belanja operasional dan honorium Pemerintahan Desa serta pemberdayaan Masyarakat. Khusus untuk operasional dan honorium Pemerintahan Desa diperoleh dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang 30% (tiga puluh perseratus), tanpa mengeluarkan terlebih dahulu tunjangan penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya.

Adapun gambar kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat dari gambar 2.1

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan ialah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *pur-positive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), anali-sis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih me-nekankan makna dari pada *generalisasi*.²⁸

Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dengan kata lain, Penelitian kualitatif lebih memungkinkan untuk mengupas problematika secara lebih jelas karena penelitian dilakukan secara lebih mendalam dan secara langsung terhadap objek yang diteliti dan bukan dalam bentuk statistik dengan pengukuran sesuatu seperti halnya pada penelitian kuantitatif yang berfokus pada angka-angka dan penilaian sistem.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (cet.12; Bandung, Alfabeta: 2009) h. 14

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sinjai, Kecamatan Sinjai Barat Desa Bontosalama, yang titik pengambilan data penelitian terkait dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

B. *Jenis Dan sumber data*

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden yang diinginkan oleh peneliti melalui wawancara dengan narasumber serta pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang dibutuhkan adalah tanggapan pemerintah desa, aparatur desa, serta masyarakat tentang penyelenggaraan otonomi desa selama ini..

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan seperti:

- a) Data-data tentang rincian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan kewenangan lainnya yang telah ada pada Desa,
- b) Data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografis, demografis.
- c) Data-data lainnya yang diperoleh dari kecamatan, desa dan instansi lain yang terkait.

C. *Metode Pengumpulan Data*

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Observasi sebagai pengumpulan data yang sangat banyak ditentukan oleh peneliti itu sendiri, sebab pengamat melihat, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang dia amati. Teknik observasi ini dilakukan melalui dua alur yaitu, langsung dan tidak langsung.

Observasi langsung adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan gejala-gejala pada objek yang dilakukan secara langsung ditempat kejadian, sedangkan observasi tidak langsung adalah pengumpulan data melalui pengamatan, pencatatan, dan gejala-gejala pada objek penelitian, yang pelaksanaannya tidak secara langsung pada objeknya.²⁹

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah proses percakapan tatap muka antara pewawancara (*interviewee*) dengan orang yang diwawancarai (*interviewer*) untuk mendapatkan informasi dan keterangan menyangkut hal yang diteliti. Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu menyusun pertanyaan berkaitan dengan masalah yang diteliti hal ini berguna untuk mempermudah peneliti dalam melakukan proses wawancara.

²⁹ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. (Bandung:Alfabeta,2014) h. 291

3) Dokumen

Dokumen merupakan catatan tentang sesuatu yang sudah berlalu, baik berbentuk teks tertulis, *artefact*, gambar, maupun foto. Dokumenter tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan, geografi, karya tulis, serta cerita.³⁰

D. Defenisi Operasional Variabel

Menjelaskan konsep operasional dalam penelitian ini, maka variabel-variabel yang digunakan dapat di operasionalkan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bupati No.2 tahun 2018, yang merupakan dasar atau pedoman dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang di dalamnya mencakup mengenai prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- 2) Alokasi Dana Desa adalah dana penerimaan Alokasi Dana Desa melalui APBD Kabupaten Sinjai Kecamatan Sinjai Barat Desa Bontosalama.
- 3) Perencanaan yang di maksud adalah musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa, diukur dengan jumlah dengan pihak yang berpartisipasi (hadir, dan memberi saran), pokok bahasan dan hasil musrembang serta transparasi rencana kepada masyarakat. sesuai dengan Peraturan Bupati No.2 Tahun 2018 tentang prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Sinjai
- 4) Pelaksanaan yang dimaksud adalah penyelesaian kegiatan yang telah direncanakan, diukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi (tenaga atau materi), transparansi informasi kegiatan kepada masyarakat dan penyelesaian

³⁰Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, penelitian gabungan*. (Jakarta:Kencana,2017) h. 292

serta capaian tujuan kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati No.2 Tahun 2018 tentang prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Sinjai.

E. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif fenomenologi, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Miles dan Huberman, dimana analisis data kualitatif adalah proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berjalan, maka tahap reduksi selanjutnya berlangsung yaitu membuat ringkasan, mengode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, dan membuat partisi. Reduksi data ini bahkan berjalan hingga setelah penelitian di lapangan berakhir dan laporan akhir lengkap tersusun.

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

Langkah ketiga ini, peneliti mulai mencari arti fenomena, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang ada kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung. Secara sederhana, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran, kekuatan, dan kecocokannya, yakni merupakan validitasnya.³¹

F. Keabsahan Data

Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat yang penelitian yang di andalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa control, dan sumber data kualitatif yang kurang kredibel akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian.

Setiap penelitian memerlukan standar untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, standar tersebut dinamakan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan/keajegan pengamatan, dan trigulasi.

- 1) Perpanjangan keikutsertaan: penelitian ini dilakukan cukup lama untuk mengenal baik responden dan keadaan lapang sehingga kehadiran peneliti

³¹Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, penelitian gabungan*. (Jakarta:Kencana,2017) h. 350-351

tidak lagi mempengaruhi situasi dan mendapat kesempatan penuh untuk mengumpulkan dan mengecek semua data yang diperlukan.

- 2) Ketekunan/keajegan pengamatan. Peneliti dalam keajegan ini mencari konsistensi dan interpretasi dengan berbagai cara yang berkaitan dengan proses dalam menganalisis yang konstan. Sedangkan dalam ketekunan pengamatan, peneliti berusaha menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan kemudian memusatkan diri pada hal tersebut secara rinci.
- 3) Triangulasi: dalam triangulasi ini peneliti menggunakan sesuatu yang lain untuk memeriksa keabsahan data. Cara yang digunakan yaitu dengan membandingkannya dengan sumber-sumber lain. Triangulasi yang digunakan adalah dengan menggunakan sumber, disini peneliti melakukan perbandingan dan mengecek kembali derajat kepercayaan dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Kedua adalah dengan melakukan perbandingan terhadap apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi, ketiga adalah dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi dari dokumen yang telah diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat

Desa Bontosalama merupakan desa yang terletak di kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Berikut ini merupakan gambaran demografi Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat. Berdasarkan pendataan profil desa, jumlah penduduk Desa Bonto Salama adalah 2.983 jiwa dan 844 KK yang terdiri dari 8 dusun dengan komposisi tersaji dalam table berikut:

Tabel 4.1 Demografi Desa Bonto Salama

JK	Jumlah Per-Dusun								Jumlah
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	
L	286	130	175	238	175	248	141	164	1.557
P	176	109	158	254	164	233	174	158	1.426
Jiwa	462	239	333	492	339	481	315	322	2.983
KK	97	76	97	125	90	152	112	95	736

Ket.:

D1 : Dusun Magala

D2 : Dusun Lapparia

D3 : Dusun Turungan Toae

D4 : Dusun Baru

D5 : Dusun Tangnga Lembang

D6 : Dusun Lembang

D7 : Dusun Sapo Tangga

D8 : Dusun Carumbang

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia

No	Usia Penduduk (Th)	Jumlah Jiwa
1	0 – 5	365
2	6 – 12	328
3	13 – 15	309
4	16 – 19	971
5	45 – 60	228
6	60 ke atas	328

Tabel 4.3 Akseptor Keluarga Berencana

No	Keterangan	Jumlah (orang)
1	Pasangan Usia Subur (PUS)	1.051
2	Jumlah peserta KB menurut umur	
	1. Kurang dari 20 Th	65
	1. 21-30 Tahun	362
	1. 31-40 Tahun	450
	1. Lebih dari 40 tahun	74
	Jumlah	877
	Jumlah seluruhnya	951

Tabel 4.4 Kader Pembangunan Desa

No	Keterangan	Jumlah (orang)
1	Jumlah KPMD	5
	Jumlah	5

1. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dalam rangka memajukan pendidikan, Desa Bonto Salama akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Sinjai.

Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Desa Bonto Salama, jumlah angka putus sekolah serta jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan, dapat dilihat di tabel di bawah ini

Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Lulusan Sekolah	Jumlah Jiwa
1	SDN atau yang sederajat	772
2	SLTP/TSanawiyah atau yang sederajat	356
3	SMU/SMK/Aliyah	299
4	Akademi/ Diploma	21
5	Sarjana Perguruan Tinggi	72
6	Belum Sekolah/Tdk bersekolah	1.463

Permasalahan pendidikan secara umum antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan seperti PAUD/TK dan SMA/SMK, rendahnya jumlah tenaga pengajar yang berkompetensi dan tingginya angka putus sekolah.

2. Perekonomian Desa

Secara umum kondisi perekonomian desa Bonto Salama di topang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: PNS/TNI/Polri, Guru swasta, Guru Honor, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, tukang kayu, pertanian/perkebunan, peternakan dan lain-lain. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
1	Petani pemilik sawah	126
2	Petani penggarap	16
3	Buruh tani	-
4	Karyawan perusahaan/pabrik	57
5	Pedagang/penjual makanan warung/toko	43
6	Pegawai negeri sipil/pensiunan	25
7	TNI/Polri/Purnawirawan	4
8	Pengemudi (mobil Bus dan Truk)	21
9	Tukang/buruh bangunan	62
10	Wiraswasta/wirausaha	17
11	Pekebun	835
12	Peternak	89
13	Lain-lain

3. Kesehatan

Sarana dan prasarana Kesehatan yang ada di desa Bonto Salama dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.7 Jumlah Tenaga Medis Dan Paramedis

No	Keterangan	Jumlah (orang)
1	Dokter Umum	1
2	Dokter Gigi	1
3	Dokter Spesialis	-
4	Dokter Hewan	-
5	Bidan	2
6	Mantri Kesehatan	1
7	Perawat	6
8	Dukun Bayi	2
	Jumlah	13

Tabel. 4.8 Jumlah Tenaga Medis Dan Paramedis

No	Uraian	D. I	D. II	D. III	D. IV	D. V	D. VI	D. VII	D. VIII	Jumlah
1	Puskesmas	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2	Polindes	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Tenaga medis di puskesmas	0	0	0	0	0	1	0	0	1
4	Tenaga Non Medis di PKM	0	0	0	0	0	6	0	0	6
5	Toko obat dan Jamu	0	0	0	0	0	1	0	0	1
6	Apotik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Dokter umum	0	0	0	0	0	1	0	0	1
8	Dokter Gigi	0	0	0	0	0	1	0	0	1
9	Dokter spesialis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Mantri kesehatan	0	0	0	0	0	1	0	0	1
11	Bidan	0	0	0	0	0	1	1	0	2
12	Dukun bayi	0	0	0	1	0	1	0	0	2
13	Posyandu	1	0	0	1	1	0	0	0	7

Adapun jarak tempuh terjauh warga desa Bonto Salama ke Puskesmas adalah 3 km atau 65 menit apabila ditempuh dengan berjalan kaki yaitu Dusun Magala ke Dusun Lembang (Puskesmas).

4. Kesejahteraan Sosial

Masalah kemiskinan dan pengangguran tetap merupakan salah satu masalah di Desa Bonto Salama dan Kabupaten Sinjai pada umumnya hingga per 2015 sesuai hasil pendataan di dapatkan masih ada 182 KK yang menerima Beras Miskin yang merupakan keluarga miskin (kurang mampu). Demikian juga dengan Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di desa Bonto Salama. Berikut data PMKS di Desa Bonto Salama.

Tabel. 4.9 Jumlah PMKS

No	Uraian	Tahun 2015		Jumlah	Ket.
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Lanjut Usia terlantar	0	0	0	
2.	Anak terlantar	0	0	0	
3.	Anak Yatim/Piatu	0	0	0	
3.	Keluarga Miskin	149	215	364	
4	JKN APBN / PBI	0	0	0	
5	JKN APBD / PBI DA	0	0	0	
6	JAMKESMASDA	0	0	0	
7.	Tuna Netra	0	0	0	

8.	Tuna Rungu	2	0	0	
9	Tuna Wicara	4	0	4	
10	Tuna Rungu-Wicara	3	0	3	
11	Tuna Daksa/tubuh	1	0	1	
12	Tuna Grahita/mental	0	0	0	
13	TunaLaras/eks jiwa	0	0	0	
14	Cacat eks kusta	1	0	1	
15	Cacat Ganda/jiwa+fisik	0	0	0	
16.	Gelandangan	0	0	0	
17.	Pengemis	0	0	0	
18.	Bekas Narapidana	0	0	0	

5. Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan Infrastruktur akan dihadapkan pada terbatasnya kemampuan Pemerintah Desa untuk menyediakannya. Pada sebagian infrastruktur, pihak Desa telah berhasil menghimpun swadaya masyarakat murni yang terkoordinir di masing-masing RT , RW dan Dusun.

Tabel. 4.10 Jumlah Prasarana Dan Sarana Desa

No	Jenis prasarana & sarana desa	Volume
1.	Jalan Desa	15,34 km
2.	Jalan Rabat Beton	2,75 km
3.	Jalan Kampung, Setapak/Tani	20,03 km
4.	Gedung Puskesmas/Puskesmasdes/Posyandu	1/1/3

5.	Gedung Pendidikan (PAUD,Tk,SD,SMP/MTs, MA)	10
6.	Baruga Pertemuan	1
7.	Kantor Dusun	1
8.	Masjid/Mushola	8/1
9.	Lapangan Sepakbola	2
10.	<ul style="list-style-type: none"> • Irigasi induk Lembanna • Irigasi Suplesi Bilulu dan Rumpala • Irigasi Tersier/Jaringan skala kecil 	7 km 5 km 8 km
11	Kantor Desa	1
12	Sanggar Tani	1
13	Perkuburan Umum	2
14	Poskamling Tipe B	1
15	Kantor PKK, BPD, LPM	1

Beberapa masalah sarana dan prasarana yang perlu mendapat perhatian dan merupakan kebutuhan bagi masyarakat desa antara lain :

- a. Perbaikan Jalan Desa (Poros antar desa)
- b. Perbaikan Irigasi Induk Lembanna yang rusak parah
- c. Saluran / Jaringan IrigasiSuplesi dan Tersier
- d. Pembangunan jalan desa termasuk setapak/rintisan
- e. Peningkatan Jaringan Air Bersih yang baik dan cukup
- f. Pembangunan Drainase Jalan/Lapangan
- g. Pembangunan/Perbaikan Gedung Pendidikan dan posyandu
- h. Sarana Peningkatan Ekonomi Kreatif

- i. Pemeliharaan Cagar Wisata Budaya dan Pembangunan Wisata Desa alam
- j. Pelatihan dan Peralatan/kebutuhan pertanian, dan peternakan
- k. Penyediaan Bibit Peternakan (Sapi, Kambing dan Ayam AKUSI)

6. Visi dan Misi

Visi:

"Desa bonto salama yang sejahtera, berwibawa, agamis, nasionalis, dan mengedepankan pelayanan publik"

Misi

- a. Meningkatkan mutu kesejahteraan semua lapisan masyarakat Bonto Salama melalui peningkatan SDM yang berkualitas, produktifitas SDA dengan suatu sistem usaha yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan untuk mencapai tarap kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri.
- b. Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
- d. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan perundang-undangan.
- e. Mendukung dan melakukan percepatan pembangunan dengan 5 abdi (panca abdi) Kabupaten Sinjai (mengabdi untuk masyarakat membangun bidang Agama, Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian dan Infrastruktur) melalui

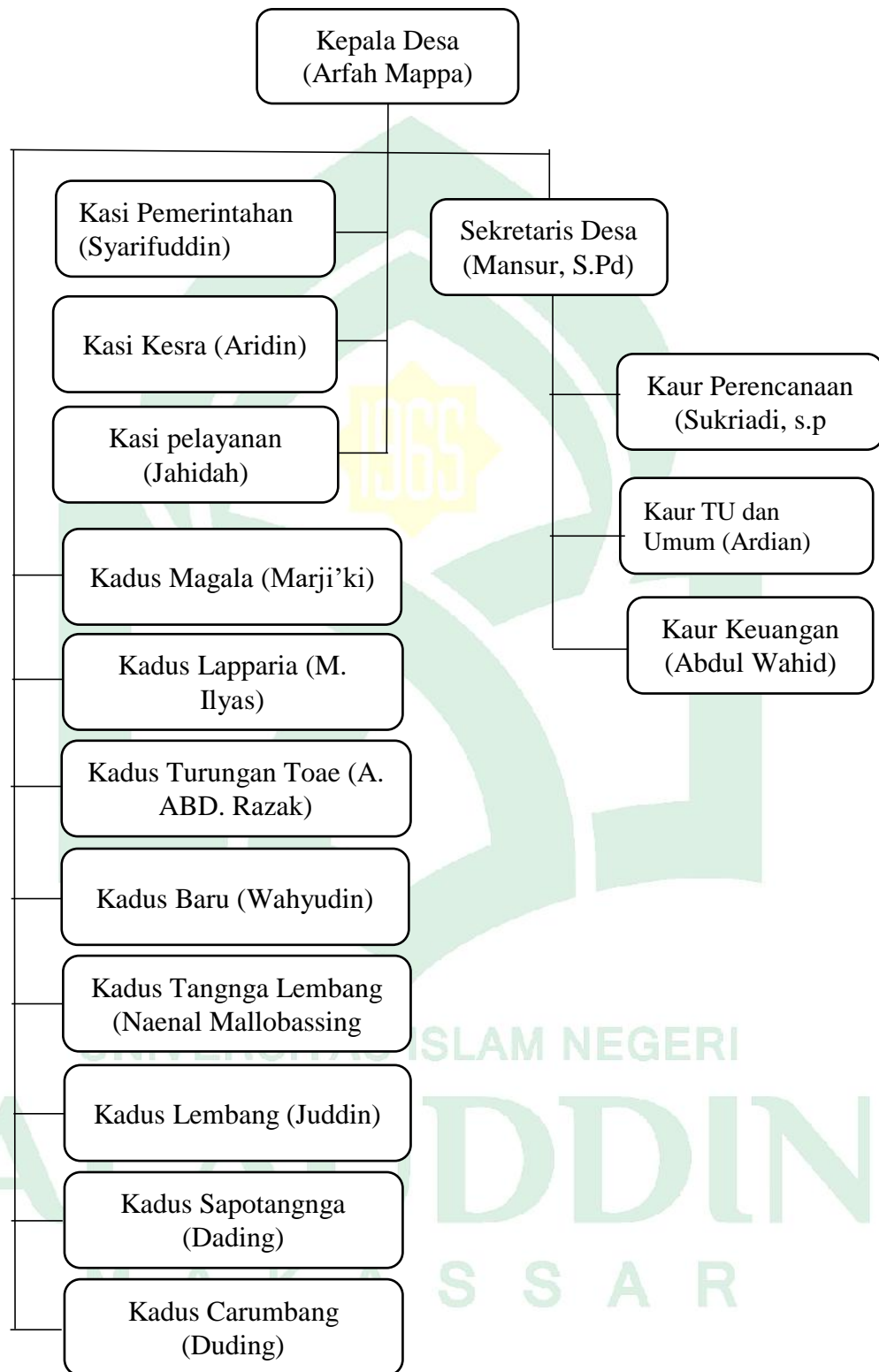
program-program kerja Kabupaten Sinjai, program kerja desa dan partisipasi masyarakat.

- f. Menumbuhkan gairah individu-individu yang mau dan mampu menjadi insan yang tangguh dalam pengembangan usaha didesa Bonto Salama.
- g. Mengembangkan potensi desa/masyarakat untuk berdaya guna dan berhasil guna.³²

7. Struktur Pemerintahan Desa Bonto Salama

³² <https://bontosalama.desa.id/data/demografi> Diakses pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2019 Pukul 15.00 Wita.

Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Bonto Salama



Sumber: Pemerintah Desa Bonto Salama, 2019

B. Hasil Penelitian

1. Perencanaan

Tahap perencanaan alokasi dana desa di Desa Bonto Salama secara praktis sudah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan yang diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipasi dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana alokasi dana desa yang dimaksud dalam perencanaan itu terdiri dari kepala desa selaku penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK), sekertaris desa selaku penanggung jawab administrasi (PJAK), bendahara desa selaku kepala urusan keuangan (KUK) dan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal yang pertama dilakukan adalah musrenbang yang berprinsip pada peraturan Bupati No 2 tahun 2018 yang didalamnya memuat asas partisipasi yang harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Musyawarah tingkat dusun dilakukan bertujuan untuk menampung berbagai usulan-usulan warga yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bersifat publik.³³

Disisi lain pemerintah desa membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang meliputi RPJM Desa dan RKP Desa. Kemudian BPD menyelenggarakan musrenbang desa yang diadakan untuk membahas serta menyepakati secara bersama mengenai rancangan RKP Desa dan juga untuk membahas

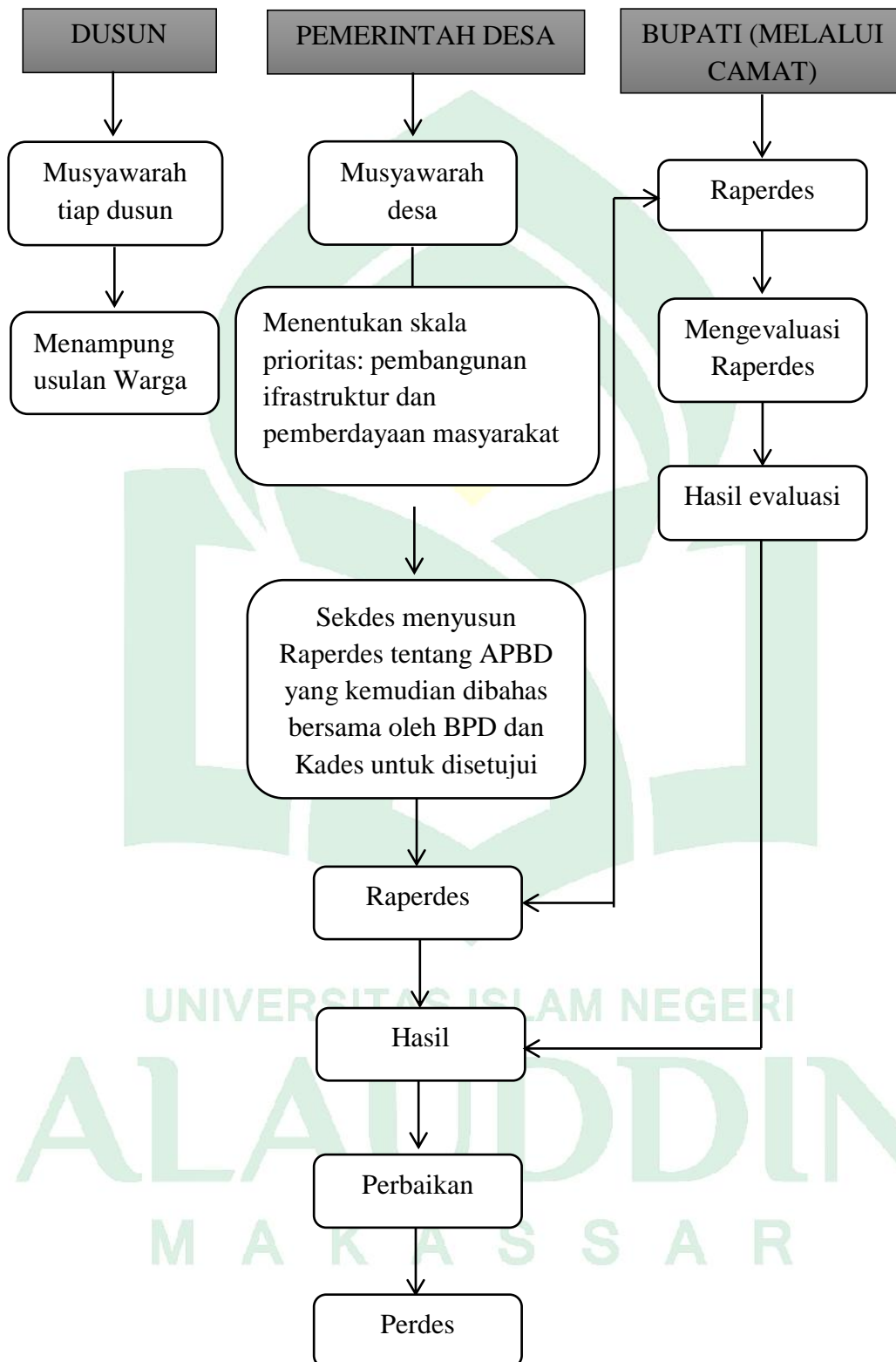
³³Bupati Sinjai 2018. Peraturan Bupati No. 113 Tentang prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa, pasal IV ayat (1).

prioritas dan skala prioritas program kerja yang dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai dengan usulan masyarakat pada saat musdus.

Musrembang diselenggarakan secara partisipatif dan terbuka yang berdasarkan pada hak dan kewajiban masyarakat desa. Salah satu indikator keberhasilan Musrembang adalah keterlibatan para aparatur dan masyarakat dalam kegiatan musrembang, maka hasil dari forum musrembang tersebut lebih kuat. Masyarakat selain sebagai partisipan dia juga sebagai pengawas dari tahap musrembang hingga tahap output dari Alokasi Dana Desa tersebut. Dalam pengambilan keputusan masyarakat juga ikut dilibatkan dalam menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bonto salama khususnya sehingga output dari keputusan masyarakat tersebut benar-benar terpenuhi.

Tahap perencanaan di desa Bonto salama dapat dilihat dibawah ini:

Gambar 4.2 Tahap Perencanaan Pengelolaan ADD di Desa Bonro salama.



Sumber : Dikembangkan Oleh Penulis dari hasil wawancara

Akan tetapi, proses musrembang yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan prinsip pada peraturan Bupati No 2 tahun 2018 yang didalamnya memuat asas partisipasi yang harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan sehingga hal ini membuat pada tahapan perencanaan tidak optimal. Berikut ini adalah hasil dari proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden pada tahap perencanaan wawancara kepada Kepala Desa Bonto Salama bapak Arfah Mappa bahwa:

“Hal yang pertama dilakukan adalah musyawarah tingkat dusun yang melibatkan masyarakat serta aparat pemerintah desa Bonto salama dan ketua BPD. Hal ini untuk menampung berbagai usulan masyarakat tentang pembangunan apa saja yang dibutuhkan di setiap dusun, hal ini dilakukan di setiap tahun sebelum perencanaan pembangunan dilaksanakan.” (wawancara tanggal 05 agustus 2019)³⁴

Pada setiap musrembang desa dilaksanakan, pemerintah Desa Bonto Salama beserta aparatur-aparatur desa bekerja sama dengan BPD, Kepala dusun, karang taruna, Tokoh masyarakat, dan masyarakat biasa. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan sekretaris desa Bonto Salama bapak Mansur, S.Pd yang menyatakan bahwa:

“pemerintah Desa Bonto Salama beserta elemen-elemen yang terkait berkumpul untuk membahas atau menampung berbagai aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk pembangunan selama satu tahun mendatang. Tapi, kami menghadapi sedikit hambatan terkait keterlibatan masyarakat yang hanya beberapa yang hadir pada saat musrembang desa dilaksanakan, hal ini tentu menyulitkan kami dalam membuat perencanaan terhadap pembangunan apa saja yang dibutuhkan. Selain itu yang hadir dalam musrenbang minim akan aspirasi tentang hal apa yang akan dibangun sesuai dengan keperluan di daerahnya sehingga mau tidak mau kami yang mengusulkan pembangunan meskipun nantinya tidak sesuai dengan

³⁴ Arfah Mappa, wawancara, di Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat 05 agustus 2019.

apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.” (Wawancara pada tanggal 05 agustus 2019)³⁵

Berikut adalah beberapa hasil wawancara pada masyarakat salah satunya bapak Baso pekerjaan sebagai petani dan peternak sapi yang mengatakan bahwa:

“Memang ada pemberitahuan mengenai musrembang desa yang dilaksanakan di setiap dusun yang disampaikan langsung baik itu di Mesjid atau kepala Dusun yang menyampaikan langsung kepada RW/RT di setiap dusunnya. Kami tidak hadir karena kami juga memiliki kesibukan di kebun dan di peternakan. Kami juga tidak bisa meninggalkan pekerjaan karena pekerjaan tetap kami sebagai petani dan peternak.” (Wawancara pada tanggal 06 Agustus 2019).³⁶

Wawancara yang kedua yang dilakukan peneliti kepada masyarakat yaitu bapak Dahlan Pekerjaan petani dan penyadap pohon aren menyatakan bahwa:

“tidak bisaki mengikuti musrembang desa nak. karena pekerjaan kami sebagai petani dan penyadap aren yang setiap paginya harus kekebun untuk memberi makan pada ternak dan menyadap pohon aren. Waktu kami itu tersita disitu belum lagi kalau masa panen perkebunan atau sawah biasanya hingga malam kita di kebun atau di sawah bekerja jadi tidak ada waktu untuk pergi musrenbang.” (wawancara 06 agustus 2019)³⁷

Dari hasil wawancara diatas peneliti menemukan keterangan dari beberapa informan pada tahap perencanaan yaitu bapak Arfah Mappa selaku Kepala Desa Bonto Salama. Secara prosedur sudah melaksanakan sesuai yang semestinya hal ini sesuai keterangan bapak Mansur, S.Pd selaku Sekretaris Desa Bonto Salama akan tetapi, pada saat musrembang dilakukan terdapat kendala. Kendala yang dihadapi ialah tingkat partisipasi masyarakat yang kurang dimana, masyarakat yang terlibat pada saat musrembang sangat sedikit sehingga hal ini membuat pemerintah sulit melakukan keputusan pembangunan apa yang akan dibutuhkan

³⁵ Mansur, wawancara, di Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat, 5 agustus 2019.

³⁶ Baso, wawancara, di Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat, 6 agustus 2019.

³⁷ Dahlan, wawancara, di Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat, 6 agustus 2019.

oleh masyarakat. Atas dasar tersebut pemerintah desa membuat keputusan secara sepihak karena pemerintah harus menggunakan dana yang sudah tersedia.

Selain itu menurut responden bapak Dahlan dan bapak Baso sebagai masyarakat. Peneliti menemukan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat terhadap musyawarah yang dilakukan di desa Bonto Salama karena alasan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan tentang keikutsertaan masyarakat dalam menyuarakan aspirasi untuk pembangunan yang sesuai dengan pasal 80 UUD desa yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.³⁸

Secara prosedur kepala desa dan aparatur desa sudah melaksanakan aturan sesuai dengan aturan yang semestinya mulai dari tahap awal musrenbang akan dilakukan pemerintah menyampaikan sosialisasi dan disampaikan di tiap-tiap dusun kemudian setiap dusun menyampaikan sosialisasi kepala desa di masing-masing masjid di setiap dusun.

Dari beberapa keterangan informan diatas menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh desa Bonto salama pada saat musrenbang desa dilaksanakan adalah kurangnya partisipasi masyarakat yang kemudian berimbas terhadap hasil dari musrenbang desa untuk perencanaan pembangunan satu tahun berjalan. Meskipun, pemerintah desa sudah mengupayakan dan berkoordinasi di setiap aparatur desa, akan tetapi mereka tidak bisa juga memaksakan kehendak masing-masing masyarakat atas dasar pekerjaan akhirnya pemerintah dan aparatur desa

³⁸ Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 79 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.

sendiri yang membuat keputusan walaupun hasilnya tidak sesuai dengan keperluan masyarakat.

Semestinya prinsip-prinsip ketika melakukan Musrenbangdes harus terpenuhi sesuai dengan peraturan Bupati No 2 tahun 2018 agar pembangunan yang dilakukan optimal dan maksimal, sebab pada prinsipnya musrembang desa merupakan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip sesuai peraturan Bupati No 2 tahun 2018 yang didalamnya memuat asas partisipasi yang harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.³⁹

Prinsip ini mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan atau aspirasi yang berkembang.⁴⁰ Meskipun demikian perencanaan pembangunan desa di Bonto Salama tetap terlaksana karena masyarakat kurang berpartisipasi dalam musrembang desa akan tetapi pembangunan tetap berjalan walaupun kurang optimal.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Namun tahap pelaksanaan lebih sering diidentikkan dengan proses realisasi anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaanya bersumber

³⁹ Bupati Sinjai 2018. Peraturan Bupati No. 113 Tentang prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa, pasal IV ayat (1).

⁴⁰ Diansari, Rani Eka. 2015. *Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013*. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015. ISBN 978-602-73690-3-0.

dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Kemudian tim pelaksana desa akan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan program kegiatan di lapangan.

Tahap pelaksanaan alokasi dana desa di semua item kegiatan sepenuhnya terlaksana dari 21 item kegiatan pelaksanaan alokasi dana desa tahun 2018, 19 diantaranya terlaksana sesuai waktu yang di tentukan. Hal ini sudah sesuai Peraturan Bupati No.2 Tahun 2018 namun, dua kegiatan yang lainnya tidak sesuai Peraturan Bupati No.2 Tahun 2018 karena ketika tahap pelaksanaan dilakukan sudah melewati batas waktu sesuai yang di tentukan. Hal ini membuat kedua jenis kegiatan tersebut tidak optimal sesuai yang disebutkan Peraturan Bupati No.2 Tahun 2018. Kedua jenis kegiatan tersebut adalah pembangunan dekker/ gorong-gorong dan pembangunan sekolah PAUD.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan, dengan anggaran Alokasi Dana Desa di desa Bonto salama Kecamatan Sinjai barat yang diperuntukkan untuk desa dalam melaksanakan pembangunan Infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa Bonto Salama.

Pada desa Bonto Salama, Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari lima sampai delapan anggota yang dibawah langsung oleh PTPKD atau tim pelaksana desa yang di koordinatori oleh Sekretaris Desa, yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, dan melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada di lapangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sekretaris Desa Bonto Salama bapak Mansyur, S.Pd. sebagai berikut:

“sebelum mengimplementasikan alokasi dana desa kami terlebih dahulu melakukan pembentukan tim yaitu TPK tim pelaksana kerja yang di pilih oleh bapak Sukriadi. SP selaku bidang perencanaan yang menunjuk masyarakat sesuai dusun yang akan di laksanakan pembangunan. Hal ini kami lakukan agar masyarakat juga menikmati pembangunan bukan hanya dalam bentuk materiil akan tetapi dalam bentuk materi juga ia dapat nikmati,hal ini juga untuk pemberdayaan masyarakat sehingga ekonomi masyarakat juga dapat meningkat.” (Wawancara Sekretaris Desa tanggal 13 Agustus 2019)⁴¹

Kemudian, untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pemerintah desa Bonto Salama juga melibatkan masyarakat dalam melakukan pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD. Mereka akan memilih beberapa warga yang kurang mampu untuk ditawari sebagai tukang dalam pembangunan fisik program kerja pemerintah desa Bonto Salama. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Bonto Salama dan telah konsisten dengan pernyataan dari warga yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan fisik program kerja desa Bonto Salama. Pernyataannya adalah sebagai berikut:

“ kami melibatkan masyarakat lokal agar ikut di berdayakan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang kami utamakan yaitu masyarakat yang kurang mampu agar ekonominya juga dapat meningkat ” (wawancara Kepala Desa Bonto Salama 13 Agustus 2019)⁴²

Dari keterangan di atas Kepala desa Bonto Salama sangat memprioritaskan keterlibatan masyarakat dalam proses pengerjaan dari anggaran Alokasi Dana

⁴¹ Mansur, *wawancara*, di Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat, 13 agustus 2019.

⁴² Arfah Mappa, *wawancara*, di Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat 13 agustus 2019.

Desa terkhusus bagi masyarakat yang kurang mampu agar ekonomi masyarakat tersebut meningkat serta ikut diberdayakan dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Berikut adalah Alokasi Penggunaan Anggaran ADD tahun 2018 di desa Bonto Salama yang belum optimal dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Gambar 4.3 Alokasi penggunaan Anggaran ADD Tahun 2018

Bidang Kegiatan	Program	Uraian Output	Anggaran
Pembangunan Desa	Pembangunan Paud (insentif guru Paud)	Peningkatan sarana dan prasarana Paud	39.750.000,00
	Pembangunan dekker dusun lapparia, magala	Memperlancar saluran air	129.230.000,00
Total			168.980.000,00

Berikut ini hasil wawancara sekretaris desa Bonto Salama bapak Mansyur, S.Pd:

“Beberapa kendala yang kami temui di lapangan adalah yang pertama mengenai Pembangunan Paud yang terkendala pada masalah ketua TPK yang terpilih sebagai pelaksana dari pembangunan Paud belum memiliki kesempatan untuk mengerjakan proses pembangunan Paud. Kami sudah melakukan koordinasi pada pihak TPK namun jawaban yang kami terima yaitu dia memiliki pekerjaan pembangunan rumah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi proses pembangunan Paud ini akan dilaksanakan setelah pembangunan rumah yang sedang ia kerjakan rampung sepenuhnya.” (Wawancara Sekretaris Desa Bonto Salama 16 Agustus 2019)⁴³

⁴³ Mansur, wawancara, di Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat, 16 agustus 2019.

Dari keterangan di atas ditemukan bahwa hambatan pembangunan Paud yang dilaksanakan utamanya ialah terletak pada TPK yang terpilih yang ditunjuk langsung sebagai pelaksana dari kegiatan pembangunan Paud tersebut. Alasan tidak mengerjakan pembangunan paud karena, tim TPK yang terpilih juga memiliki pekerjaan yang lebih mendesak yang lainya yang harus di selesaikan secepat mungkin.

ketersediaan seluruh bahan yang diperlukan dalam proses pembangunan paud sudah terpenuhi akan tetapi karena tim TPK yang terpilih juga mempunyai pekerjaan yang lebih mendesak pemerintah juga tidak mempunyai pilihan lain selain menunggu pekerjaan yang tim TPK sedang kerjakan selesai. Padahal perencanaan pembangunan Paud sudah melewati batas yang telah direncanakan sebelumnya yang seharusnya rampung pada bulan April 2018. Hal ini kemudian mempengaruhi waktu pelaksanaan dari perencanaan yang sudah di tetapkan dan pada saat itu juga tim pemeriksa akan turun kelokasi untuk memeriksa hasil pembangunan tersebut sesuai jadwal yang di tentukan sebelumnya.

Sedangkan pembangunan yang kurang optimal dalam pelaksanaan yang lainya adalah pembangunan dekker sebanyak 14 unit yang di laksanakan di dusun Lapparia. Berikut adalah hasil wawancara dari bidang kaur perencanaan Bapak Syukriadi. SP:

“kami megalami hambatan pada saat membangun dekker di dusun Lapparia karena pada saat itu kendala kami adalah medan yang sangat sulit dijangkau sehingga bahan-bahan yang diperlukan harus di simpan jauh dari titik pembangunan Dekker tersebut. Di saat yang bersamaan musim hujan sudah turun sehingga medan lebih sulit untuk di akses sehingga tidak bisa di jangkau oleh kendaraan apapun. Medan yang curam, tanah

yang licin menyulitkan kami untuk segera melaksanakan proses pembangunan” (wawancara kaur Perencanaan tanggal 16 Agustus 2019)⁴⁴

Dari hasil wawancara di atas peneliti menemukan masalah utama dari pelaksanaan alokasi dana desa tersebut ialah bukan pada masalah internal atau yang ingin mengerjakan pembangunan tersebut tapi, masalah yang dihadapi ialah masalah eksternal yaitu cuaca yang pada saat itu sudah memasuki musim penghujan di Desa Bonto Salama. Pemerintah dan tim TPK tidak mampu berbuat banyak selain menunggu hujan dan tanah kering kembali kemudian baru melaksanakan kegiatan pembangunan dekker.

Masalah yang lainya adalah bahan yang akan di pakai dalam pembangunan dekker tersebut tidak di simpan pas di titik lokasi pengerjaan dekker akan tetapi jauh dari lokasi. Hal ini dilakukan karna mobil yang mengangkut materil bahan bangunan tersebut tak mampu membawa sampai ke titik lokasi dengan pertimbangan medan yang curam dan tanah yang licin sehingga tidak memungkinkan untuk di lalui.

Peran masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa diperlukan pada saat pelaksanaan Alokasi Dana Desa di lakukan sesuai permendagri bahwa selain masyarakat di berdayakan masyarkat juga ikut dalam mengawasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Hal ini dijelaskan dalam wawancara kepala desa Arfan Mappa:

“Kami tentunya mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi Alokasi Dana Desa, kami sampaikan dan tampilkan setiap tahunnya dalam bentuk spanduk besar dan kami juga memajang di depan kantor desa hal ini kami lakukan sebagai bentuk transparansi kegiatan selama satu tahun sehingga masyarakat dengan mudah mengawasi pembangunan yang di laksanakan

⁴⁴ Syukriadi, *wawancara*, di Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat, 16 agustus 2019.

oleh Desa Bonto Salama selama satu tahun” (Wawancara Kepala Desa 16 Agustus 2019)⁴⁵

Dari hasil wawancara di atas bahwa pemerintah Desa Bonto Salama sangat transparan dalam proses penyampaian tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa hal ini terbukti dari hasil wawancara di atas dan kepala desa serta aparatur yang sangat terbuka menyangkut pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Mengenai dampak adanya pembangunan dari Alokasi Dana Desa tentu memiliki manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat mulai pembangunan infrastruktur hingga layanan publik yang dapat di nikmati dengan mudah oleh masyarakat hal ini terbukti dengan wawancara yang dilakukan oleh salah satu Kepala Dusun Lapparia bapak M. Ilyas:

“ iye bagus sekali sekarang kondisi kampung berkat adanya Alokasi Dana Desa dulu haruski jalan berkilo-kilo meter untuk pergi ke peskesmas sekarang di dusun kami sudah ada pusku sehingga tidak jauh maki lagi pergi ke puskesmas jika ada orang sakit.” (Wawancara Kepala Dusun tanggal 16 Agustus 2019)⁴⁶

Dari hasil wawancara yang di peroleh dari informan ternyata alokasi dana desa sangat membantu keperluan masyarakat desa bontosalama yang biasanya sulit mendapatkan pelayanan yang kurang memadai akses fasilitas misalnya puskesmas yang dulunya sulit di jangkau kini dengan mudah di dapatkan di tiap-tiap dusun yang ada di Desa Bontosalama.

Dari beberapa keterangan informan di atas peneliti menemukan masalah dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa mulai dari maslah tim TPK yang di mandat memiliki pekerjaan lebih dari satu sehingga kemudian menghambat proses

⁴⁵Arfah Mappa, *wawancara*, di Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat, 16 agustus 2019.

⁴⁶ M. Ilyas, *wawancara*, di Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat, 16 agustus 2019.

pembangunan yang seharusnya di laksanakan tepat waktu. Masalah selanjutnya ialah karena faktor medan yang sulit di akses dan cuaca hal ini benar adanya karna kondisi jalan yang ada di Dusun Lapparia belum di beton yang masih jalan biasa berupa tanah liat yang licin apabila terkena hujan. Mobil pengangkut bahan bangunan yang akan di pakai di simpan jauh dari titik lokasi pembangunan sehingga hanya kendarann roda dua yang dapat mengangkut bahan tersebut itupun kalau hujan tidak turun.

Jadi dengan beberapa masalah tadi dalam pelaksanan Alokasi Dana Desa sehingga dalam proses pelaksanaanya terjadi hambatan yang kemudian membuat dalam pelaksanaanya tidak optimal karna tidak sesuai dengan target yang di inginkan. Meskipun terjadi beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya akan tetapi pembangun seluruhnya telah rampun dan yang terpenting masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan yang di laksanakan selama ini.

Adapun dampak pembangunan oleh adanya Alokasi Dana Desa yang di rasakan oleh masyarakat di Desa Bonto Salama yaitu pembanguna infrakstruktur yang massif dan pelayan publik yang di butuhkan masyarakat sudah terpenuhi.

C. Pembahasan

1. Perencanaan

Proses Perencanaan yang dilakukan selama ini di Desa Bontosalama tidak begitu berjalan dengan baik atau tidak optimal hal ini karena tingkat partisipasi warga yang kurang untuk menghadiri

musrenbang di tiap dusun. Alasan yang selanjutnya ialah karena pekerjaan yang di mana mayoritas penduduk ialah petani, peternak dan penyadap pohon aren yang setiap paginya harus ke kebun untuk melakukan aktifitas tani, menyadap, dan memberi pakan pada hewan ternak warga yang ada di Desa Bontosalama. Atas dasar ini warga kemudian tidak memilih hadir disetiap musrenbang dilakukan.

Perencanaan yang selama ini dilakukan kurang dukungan aspirasi dari warga sehingga pemerintah dengan sendirinya memutuskan untuk melakukan perencanaan pembangunan hal ini karena pertimbangan pelaporan kegiatan dan pengelolaan anggaran. Secara prosedur pemerintah sudah melakukan sesuai ketetapan berdasarkan Permendagri No.133 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati No 2 tahun 2018 meskipun, syarat dari prosedur tersebut tidak terpenuhi

Berdasarkan pernyataan dari Sekertaris Desa Bonto Salama bahwa pemerintah Desa Bonto Salama telah melakukan prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku Permendagri No.133 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati No 2 tahun 2018 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Setelah melakukan wawancara dan mencocokkan dengan peraturan yang berlaku maka pemerintah Desa Bonto Salama dianggap telah melakukan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Permendagri No.133 Tahun 2014. Mulai dari tahapan Musdus, Musrenbang, dan juga dalam proses Perencanaan

dalam penyusunan RKP Desa, RPJM Desa, dan APB Desa, semua telah sesuai dengan Permendagri No.133 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati No 2 tahun 2018.

Namun yang menjadi kekurangan dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa sesuai hasil dari penelitian adalah kurangnya kepedulian masyarakat dalam mengikuti Musrembang Desa yang dimana hasil daripada Musrembang Desa yang kemudian di tampung untuk di buatkan suatu perencanaan. Akibat dari kurangnya kepedulian masyarakat akhirnya kegiatan pembangunan kurang banyak bahkan ada yang tidak tepat sasaran karna pemerintah dan aparatur desa yang langsung membuat keputusan pembangunan sehingga perencanaan yang di lakukan kurang optimal.

2. Pelaksanan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa yang selanjutnya akan di serahkan kepada TKP sebagai tim pelaksana kegiatan yang di laksanakan. Pelaksanaan yang di lakukan selama ini ada beberapa diantaranya yang tidak optimal sesuai pedoman Peraturan Bupati No 2 tahun 2018 meskipun demikian pelaksanaan yang dilakukan tetap berjalan walaupun tidak optimal.

Hasil penelitian pada tahap pelaksanaan menunjukkan bahwa ada beberapa kendala yang di hadapi pemerintah Desa Bonto Salama selama tahun 2018 yang pertama berasal dari TPK sendiri yang memeiliki pekerjaan lebih dari satu yang kemudian menghambat pembangunan yang seharusnya selesai tepat pada waktunya. Dilain sisi pemerintah desa juga tidak dapat mengganti TKP yang terpilih sebab tim TKP yang terpilih tersebut sudah di pilih dan tidak bisa diganti.

selain itu tim yang terpilih juga harus warga yang berada di daerah yang sedang dilakukan pembangunan sebab ini juga merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini kemudian menimbulkan dampak tersendiri pada pelaksanaan pembangunan yang seharusnya waktu pengerjaannya selesai tepat waktu sehingga proses pelaksanaannya tidak berjalan optimal.

Masalah yang kedua ialah mengenai pembangunan dekker di Dusun Lapparia. Kendala yang di hadapi berikutnya ialah masalah medan dan cuaca dan memang kondisi medan di Dusun Lapparia tidak bisa di akses oleh kendaraan roda empat karena medan, yang sulit, terjal dan curam sehingga tidak memungkinkan untuk di lalui. Terlebih lagi cuaca pada saat itu sedang terjadi hujan yang semakin mempersulit medan yang akan di lalui. pemerintah dan TPK yang terpilih pada saat itu harus menunggu kondisi medan steril kembali untuk kemudian segera melaksanakan kegiatan pembangunan dekker tersebut.

Akibat dari kendala tersebut membuat waktu pelaksanaan pengerjaan dekker melewati dari waktu yang di tetapkan sebelumnya sehingga hal ini juga membuat pelaksanaannya tidak optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai optimalisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat, dapat di tarik kesimpulan.

Bahwa masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat baik dari sisi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Bonto Salama. Sisi perencanaan khususnya musrembang masih terdapat kekurangan yaitu tingkat partisipasi warga yang masih minim akan kesadaran untuk ikut terlibat dalam berpartisipasi aktif untuk mengikuti musrenbang di Desa Bonto Salama. Sedangkan dari sisi pelaksanaan masalah yang ditemukan adalah tim TPK yang di tunjuk memiliki pekerjaan yang lebih dari satu sehingga harus mengorbankan salah satu pekerjaan yang harus di kerjakan. Selanjutnya untuk masalah pelaksanaaaa yaitu terkendala pada medan yang sulit serta cuaca yang pada saat itu telah memasuki musim penghujan yang khususnya pembangunan di Dusun Lapparia yang memiliki medan yang sulit di jangkau dan bertambah parah ketika musim hujan tiba akses menuju ke lokasi tersebut tidak dapat di jangkau.

B. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah di uraikan di atas, maka saran dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penelitian selanjutnya agar membahas masing-masing komponen Alokasi Dana Desa secara rinci, detail dan mendalam.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan lagi jumlah informan yaitu BPD dan masyarakat desa yang lebih banyak jumlahnya agar dapat menilai dengan pasti mengenai prinsip good governance dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.
3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar dapat mencari objek penelitian yang dapat terbuka agar penelitian yang dilakukan bisa sedetail dan serinci mungkin.
4. bagi pemerintah khususnya di Desa Bonto Salama agar mampu mengajak masyarakat berpartisipasi aktif ketika proses musrembang diadakan tujuannya agar pemerintah tidak asal membangun dan harus di dasari sesuai keperluan masyarakat.
5. Mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa masyarakat juga berperan penting dalam proses pembangunan desa agar masyarakat sadar dan mau ikut berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan di Desa Bonto Salama.
6. Memastikan tim pelaksana kegiatan (TPK) tidak mempunyai pekerjaan yang lebih agar pekerjaan yang di berikan mampu terselesaikan tepat waktu.

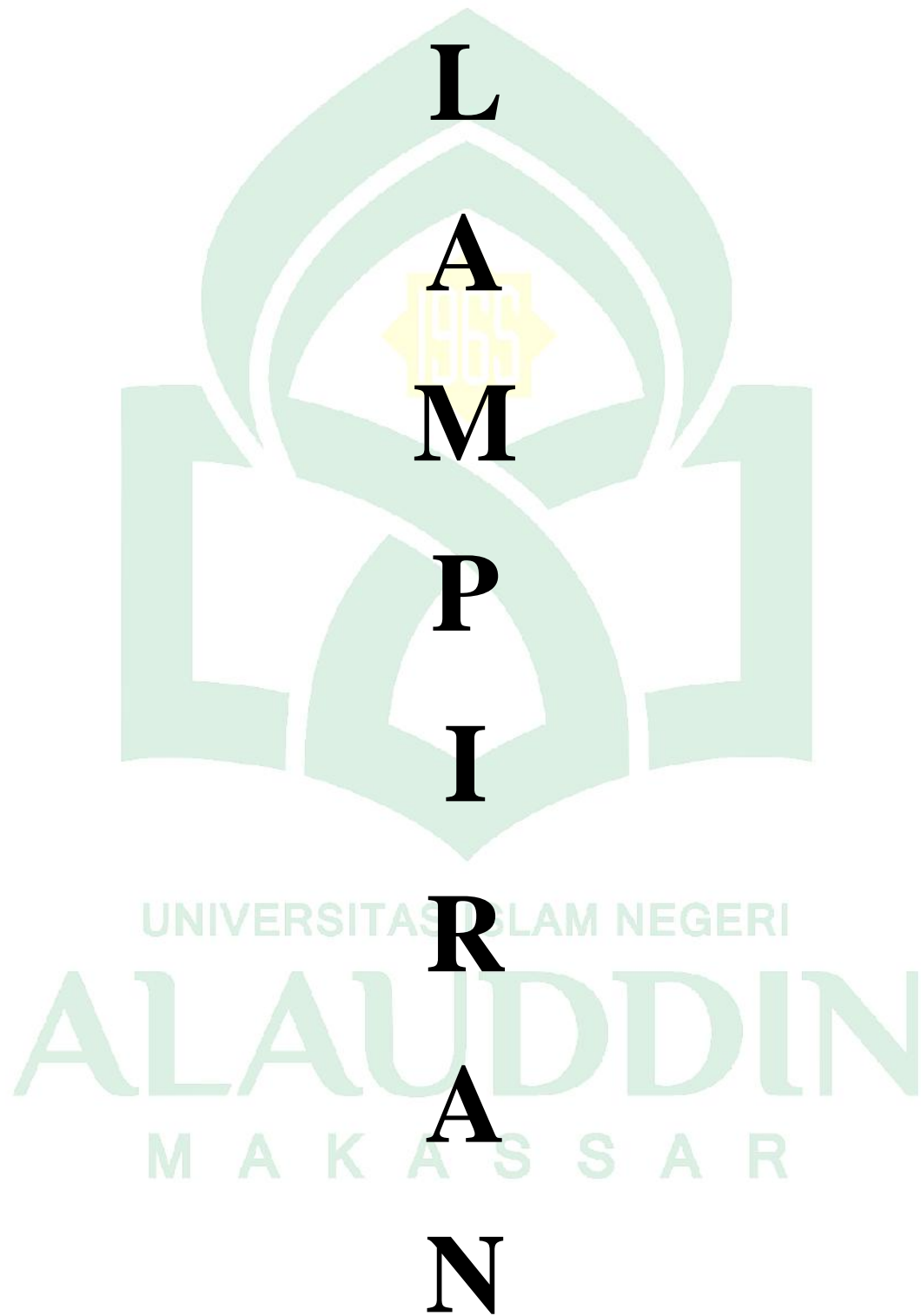
DAFTAR PUSTAKA

- Desmon Mahamurah, dkk. 2017. Optimilisasi Alokasi Dana Desa Dalam meningkatkan Pembangunan Desa (studi di desa Nahepese kecamatan manganitu). *jurnal ilmiah FISIP-Unsrat*, 6 (4).
- Herry, Antono. 2015. kesiapan desa menghadapi implementasi Undang-undang Desa (tujuan desentralisasi fiskal dan peningkatan potensi desa. *Jurnal ilmiah civis*. 5 (1).
- Thomas. 2013. pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *Ejournal pemerintahan integratif*. 1 (1).
- M. Ridwan dan M. Yusuf, 2018. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. 1 (1).
- Sri Mulyani. 2017 *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementrian Keuangan.
- Yuyuk, mangku poernomo. 2003. *Sosiologi Pendesaan*. Jakarta: Laperana.
- Lembaga Administrasi Negara. 2008. *Teori dan Indikator Pebangunan*. Jakarta: LAN.
- Astrella Janice. 2015. Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bpmd) Dalam pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*. 1 (1).
- Damsar dan Indrayani. 2016. *pengantar Sosiologi Perdesaan*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Priyo Sambodo. 2014. Implementasi Dana Bantuan Pt. Kideco Jaya Agung Dalam Pembangunan Di Desa Sempulang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*. 2 (2).
- Endang Soetari. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Riyadi dan Dedi Supriadi bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: UM. Press.

- Rozaki, abdur dkk. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Nurcholis,Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Winardi, 1999. *Pengantar manajemen penjualan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Arifin P. Soeria Atmadja. 2009. *Keuangan Publik Dalm Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, Ed.
- Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. pasal 10 ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 67 ayat (2) point (b),(d) dan (e), op.cit,
- Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) Kabupaten Sinjai: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerinthan Desa, 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. BAB IX Pasal 19
- Bupati Sinjai 2018. Peraturan Bupati No. 113 Tentang prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa, pasal IV ayat (1).
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung, Alfabeta
- Singarimbun, Masri dan Effendi. 1995. *Metode penelitian survey* Jakarta:Pustaka LP3ES.
- Hamid Darmadi. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf,Muri.2017. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatid, penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana
- Nazir M. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- <https://bontosalama.desa.id/data/demografi> Diakses pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Pukul 15.00 Wita.
- Republik Indonesia.2014. Undang-Undang No. 79 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.

Diansari, Rani Eka.2015. *Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013*. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015. ISBN 978-602-73690-3-0.





Daftar Pertanyaan :

“Optimalisasi perencanaan dan penggunaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan di Desa Bontosalama”

Tahap Perencanaan:

1. Bagaimana mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bonto salama ?
2. Apakah perencanaan yang sudah di tetapkan menghasilkan seperti yang akan di capai ?
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?
4. Siapa saja yang hadir pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa dalam rangka perencanaan Alokasi Dana Desa Bonto salama ?
5. Apa sajakah program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh Alokasi Dana Desa Bonto salama ?

Tahap Pelaksanaan:

1. Bagaimana proses pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Bontosalama?
2. Apakah ada kesulitan dari pemerintah Desa Bontosalama dalam proses melaksanakan Alokasi Dana Desa ?
3. Bagaimana peran pemerintah Desa Bontosalama dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari Alokasi Dana Desa?
4. Bagaimana peran masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari Alokasi Dana Desa?
5. bagaimanakah dampak yang di rasakan oleh masyarakat selama ini sejak dilaksanakannya Alokasi Dana Desa ?

Dokumentasi Wawancara:

**Dokumentasi wawancara Kepada Bapak Arfah Mappa
(Kepala Desa Bonto Salama)**



**Dokumentasi Wawancara Kepada Bapak Mansyur, S.Pd
(Sekretaris Desa Bonto Salama)**

ALAUDDIN
MAKASSAR



**Dokumentasi wawancara Kepada Bapak Sukriadi, S.P
(Kaur Perencanaan dan Pembangunan)**



**Dokumentasi wawancara Kepada Bapak Junaedi
(BPD Desa Bonto Salama)**

Dokumentasi Pembangunan yang Tidak Optimal Program tahun 2018




Pembangunan Dwicker Dusun Magala Desa Bonto Salama

ALAUDDIN
M A K A S S A R



Pembangunan Paud Desa Bonto Salama

ALAUDDIN
MAKASSAR


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

1 2 0 1 9 1 9 1 4 2 1 0 5 4 2

Nomor : 20253/S.01/PTSP/2019
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Bupati Sinjai

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 2547/EB.VPP.00.0/7/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUH. ANWAR**
 Nomor Pokok : 90300115130
 Program Studi : Ilmu Ekonomi
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BONTOSALAMA "


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 Juli s/d 23 Agustus 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 23 Juli 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu




A. M. YAMIN, SE., MS.
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringat.

SIMAP PTSP 23-07-2019

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap.sulseiprov.go.id> Email : ptsp@sulseiprov.go.id
 Makassar 90222

(Surat Izin Penelitian)

RIWAYAT PENULIS



MUH. ANWAR, Dilahirkan Di Kabupaten Sinjai tepatnya di Didusun Tapillasa Desa Pattongko kecamatan Sinjai Tengah pada tanggal 27 Juli 1997. Anak kedua dari dua bersaudara pasangan dari bapak Baharuddin dan ibu Lina. Peneliti Menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar SDN 112 Sattulu, Kecamatan Sinjai Tengah kabupaten Sinjai pada tahun 2009. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di MTs. Muhammadiyah Pattongko, kabupaten Sinjai dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Sekolah menengah Atas di SMA Negeri 2 Sinjai Tengah pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri. Tepatnya di Universitas Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada program Studi Ilmu Ekonomi dan diselesaikan pada tahun 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R